

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Bruggink, J J H, and Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian*
- Budi, M., *Penerapan Aturan Pemilihan Kepala Daerah dan Konsekuensinya Terhadap Posisi Anggota Legislatif*, Jakarta: Penerbit Grafindo, 2023, hlm. 123-134.
- dan Pemahaman Hukum, Hakikat, dan Aktualisasinya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Haris, Syamsuddin. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor, 1998.
- Kaloh, Johan. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pengertian Anggota Legislatif*.
- Kansil, C S T, and Christine Kansil. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Situmorang, E., *Prinsip-Prinsip Hukum Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.
- Strong, Charles Frederick. *Modern Political Constitutions*. London: The English Language Book Society, 1966.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Situmorang, E., *Prinsip-Prinsip Hukum Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022

### B. Jurnal

- Amal, Bakhrul. "Konsep Ideal Badan Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum." *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 2021, 53–70.
- Annurdi. "Dampak Pilkada Langsung Terhadap Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal TAPIS Universitas Jambi*, n.d.

- Ardipandanto, Aryojati. "Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan." *Kajian* 26, no. 1 (2023): 51–74.
- Bahsan. "Pendekatan Normatif Dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019): 123–135.
- Husni, A., *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2021
- Wardhani, L. T. A. L., Ibrahim, F., & Christia, A. M. (2020). *Koherensi sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 305-318
- International Journal of Legal Studies. "Legal Research Methods: Approaches to Statute and Case Law Analysis." *International Journal of Legal Studies* 12, no. 1 (2020): 45–62.
- Jennifer, Graceyana, Jenaya Adra Rumondor, and Ryan Giovanni Christianto. "Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu: Perspektif Electoral dan Constitutional Democracy." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 34–45.
- Nabela, Tiara Kartika. "Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3, no. 3 (2023): 415–427.
- Pamungkas, Sigit. "Jurnal Pemilu dan Demokrasi." *POLGOV JURNAL Universitas Gadjah Mada*, n.d.
- Saraswati, Retno. *Calon Perseorangan : Pergeseran Paradigma Kekuasaan dalam Pemilukada*. *Jurnal Masalah – Masalah Hukum* Vol 40. Nomor 2, Tahun 2011.
- Pertiwi, A. & Rahman, F., "Evaluasi Pengunduran Diri Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu dan Pilkada: Analisis Peraturan dan Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Hukum Politik Indonesia*, Vol. 15 No. 2, 2024, hlm. 100-115.
- Pratama, A., *Konflik Kepentingan dalam Pemilu: Antara Pengaruh Politik dan Keadilan Pemilihan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022, hlm. 90-101.
- Purnaweni, Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2004): 118–131.
- Sari, Dwi Mustika. "Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan

*Kepala Daerah Tahun 2020.” Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan 5, no. 02 (2021): 259–272.*

Seran, Alexander. “*Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu Refleksi Atas Hubungan Antara Teori dan Praksis.*” *Respons: Jurnal Etika Sosial* 21, no. 01 (2016): 29–49.

Situmorang, E. & Rahman, F., “*Konsekuensi Hukum Bagi Calon Kepala Daerah yang Berstatus Anggota Legislatif Terpilih*”, *Jurnal Hukum Politik Indonesia*, Vol. 17 No. 2, 2024, hlm. 200-215.

Sutaryo, A., *Hukum Pemilu di Indonesia: Antara Kepastian dan Keadilan*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2022, hlm. 150–162.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan..

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024

### **D. Internet**

Basri, Seta. “Kajian Politik: Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia,” n.d. <https://saripedia.wordpress.com/tag/pemilu-1992>

Komara, Indra. “MK Tolak Gugatan Soal Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Ikut Pilkada.” *detikNews*, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7218878/mk-tolak-gugatan-soal-caleg-terpilih-harus-mundur-jika-ikut-pilkada>.